

Daftar Pustaka

A. Buku

Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Icsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar grafika, 2008

Barda Nawawi Arief, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Bambang waluyo, *“Penelitian hukum dalam praktek”*, Sinar grafika, Jakarta, 2002.

Eddy O.S Hiariej, *Teori dan hukum pembuktian*, Erlangga, 2012.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2015.

Fidel, *advokat penegak hukum yang mandiri*, carofin media, Jakarta, 2014.

Koesparmono Irsan, *Panduan memahami hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana*, gramata publishing, 2015.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2012.

Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2014.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Mandar maju, Bandung, 2011

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Teguh Samudra, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP. *Undang - undang No. tahun 1946*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. *Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009, tentang pengadilan
tindak pidana korupsi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 113/PMK.05/2012
*tentang perjalanan dinas dalam negeri, bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret, 2017,
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, Tentang Manajemen penyelidikan dan
penyidikan

Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001
*tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No.
132/JA/11/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana.*

Surat Jaksa Agung Muda, Pembinaan Kejaksaan Agung RI Nomor B-422/C/Cr.2/12/2017
*tanggal 22 Desember 2017. Prihal Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran.*

C. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>
diakses pada kamis 16 maret 2017, jam 02;30 WIB.

<https://independent.academia.edu/NadyacyntiaRachma> *diakses pada 7 Maret
2017 jam 03;15 WIB.*